

**TESIS**

**URGENSI UNDANG-UNDANG LEMBAGA  
KEPRESIDENAN**



**Oleh**

**TRENADI PRASETIA**

**NIM. 2320215310016**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**URGENSI UNDANG-UNDANG LEMBAGA  
KEPRESIDENAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**TRENADI PRASETIA**

**NIM. 2320215310016**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

Judul Tesis : Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan

Nama : Trenadi Prasetya  
NIM : 2320215310016

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

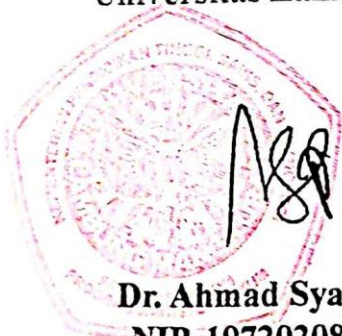

Pembimbing



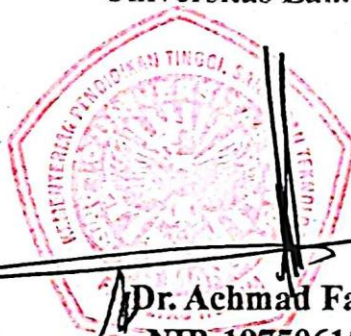

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418 198603 1 002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  
  
Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  
  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

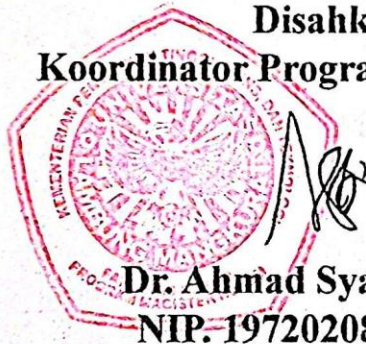
**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 8 Juli 2025**

**Pembimbing**



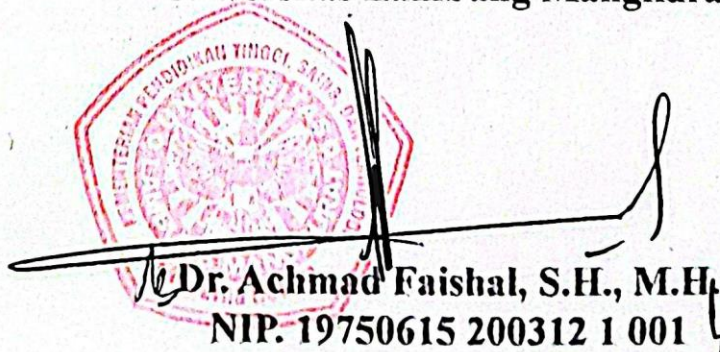
**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418 198603 1 002**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 8 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**

**Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

**Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

## MOTTO/PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya. Dengan izin dan pertolongan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagai bagian dari proses akademik dalam Program Magister Hukum.

Tesis ini peneliti persembahkan pertama-tama kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Mengetahui, yang berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”*

(QS. Al-Mujadilah: 11)

Tesis ini juga didedikasikan dengan penuh cinta dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta, Injen Marasad Daud dan Patimah Hidayah, atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tulus sepanjang hidup; kepada kakak tercinta Agus Arianto, M.Pd., dan adik tersayang Elvi Lestari, A.Md.Farm., yang selalu menjadi sumber motivasi dan kekuatan; kepada para dosen pembimbing serta seluruh pengajar yang telah berbagi ilmu, arahan, dan keteladanan selama proses akademik; kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dan kebersamaan; serta kepada almamater tercinta Universitas Lambung Mangkurat, sebagai tempat peneliti tumbuh dalam semangat keilmuan dan integritas.

Sebagai prinsip hidup, peneliti meyakini bahwa:

*“Ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk diperjuangkan dan diamalkan. Keyakinan yang kokoh akan membimbing langkah menuju keberhasilan.”*

Semoga karya ilmiah ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat serta memperoleh ridha Allah SWT

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Trenadi Prasetya  
NIM : 2320215310016  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,



Trenadi Prasetya

NIM. 2320215310016

**PRASETIA, TRENADI. 2025. URGENSI UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 139 Halaman**

## **RINGKASAN**

Tesis ini membahas persoalan krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu belum adanya Undang-Undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan. Dalam sistem presidensial, Presiden memegang posisi sentral sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kewenangan luas mencakup bidang legislasi, eksekutif, kehakiman, keuangan negara, pertahanan dan keamanan negara, serta hubungan luar negeri. Namun, pengaturan kewenangan tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 masih bersifat normatif dan umum, belum diturunkan dalam undang-undang yang mampu merinci batasan, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan Presiden secara struktural. Ketidakhadiran aturan organik ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang membuka ruang multitafsir dan dominasi kekuasaan eksekutif, sebagaimana tampak dalam berbagai praktik ketatanegaraan yang menyimpang, seperti Dekret Presiden 5 Juli 1959, penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian grasi, penggunaan Perppu untuk melewati mekanisme legislasi, hingga dugaan intervensi Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari berbagai perbuatan anomali tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan lembaga kepresidenan masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga dibutuhkan pengaturan turunan dalam bentuk undang-undang khusus yang mampu menjamin pelaksanaan kekuasaan eksekutif sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan teori negara hukum (*Rechtsstaat*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), lembaga negara, dan prinsip *checks and balances*. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi perbandingan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, tesis ini menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan Presiden di Indonesia sangat terbatas dan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Kementerian Negara, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU TNI. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menerapkan sistem presidensial murni, di mana konstitusi mereka secara rinci mengatur struktur, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Presiden. Tesis ini merumuskan bahwa pengaturan kewenangan Presiden seharusnya mencakup enam bidang utama: (1) bidang legislasi, di mana kewenangan Presiden harus dibatasi

dengan kewajiban memperoleh persetujuan DPR dalam pengesahan UU dan Perppu; (2) bidang eksekutif, di mana pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus sesuai prosedur hukum dan uji kelayakan; (3) bidang kehakiman, di mana grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR; (4) bidang keuangan negara, di mana APBN tidak boleh dijalankan tanpa persetujuan DPR dan audit BPK; (5) bidang pertahanan dan keamanan, di mana pengerahan militer harus mendapat persetujuan DPR dan tidak digunakan untuk kepentingan politik; serta (6) bidang hubungan luar negeri, di mana perjanjian internasional berdampak besar harus mendapat persetujuan DPR dan diplomasi harus berdasarkan prinsip bebas aktif. Pembatasan-pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan Presiden dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan merupakan kebutuhan hukum dan konstitusional yang mendesak. Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab kekosongan norma dengan merinci secara sistematis struktur kelembagaan Presiden, mekanisme kerja, distribusi fungsi, dan pembatasan kewenangan di setiap sektor pemerintahan. Selain itu, regulasi ini juga menjadi alat untuk memperkuat pengawasan oleh DPR, Mahkamah Agung, BPK, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam memastikan akuntabilitas kekuasaan eksekutif. Dengan adanya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, prinsip checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat, serta mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan Presiden. Oleh karena itu, tesis ini merekomendasikan agar Presiden bersama DPR segera menginisiasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai prioritas dalam program legislasi nasional. Kehadiran undang-undang ini tidak hanya akan mempertegas pelaksanaan sistem presidensial yang demokratis, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

**PRASETIA, TRENADI. 2025. Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 139 Halaman

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Lembaga Kepresidenan, Kekosongan Hukum, *Checks and Balances*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan utama yang dijawab dalam penelitian ini meliputi: pertama, urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan sebagai instrumen hukum untuk mengisi kekosongan pengaturan kelembagaan Presiden, mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada cabang eksekutif, serta memperkuat mekanisme *checks and balances*; kedua, bagaimana seharusnya pengaturan kewenangan Presiden di berbagai bidang kenegaraan dirumuskan secara sistematis dan terukur dalam undang-undang tersebut agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan dengan sistem presidensial di negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, norma konstitusional, serta praktik ketatanegaraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Undang-Undang khusus yang secara komprehensif mengatur Lembaga Kepresidenan menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak serius terhadap efektivitas pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan Presiden yang sangat luas tidak dibatasi oleh norma hukum yang terstruktur, sehingga membuka peluang dominasi cabang eksekutif dan penyalahgunaan wewenang. Lemahnya prinsip *checks and balances* tercermin dalam minimnya pengawasan legislatif dan yudikatif terhadap kebijakan strategis Presiden. Dalam berbagai bidang, kewenangan Presiden belum diimbangi regulasi yang membatasi, baik dalam hal legislasi, eksekutif, kehakiman, keuangan negara, pertahanan-keamanan negara, maupun hubungan luar negeri. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan menjadi kebutuhan konstitusional yang mendesak guna memperjelas struktur, fungsi, dan batas kewenangan Presiden dalam rangka memperkuat negara hukum yang demokratis.

**PRASETIA, TRENADI. 2025. *The Urgency of the Presidential Institution Law.***  
*Master's Program in Law, Faculty of Law, Graduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. 139 Page*

#### ABSTRACT

**Keywords :** *Presidential Institution, Legal Vacuum, Checks and Balances.*

*This study aims to analyze the urgency of establishing a Presidential Institution Law within Indonesia's constitutional system. The research addresses two main issues: first, the necessity of the Presidential Institution Law as a legal instrument to fill the regulatory void concerning the presidency, prevent the concentration of power within the executive branch, and strengthen the system of checks and balances; second, how presidential authority across various areas of governance should be systematically and measurably regulated through legislation in accordance with the principles of the rule of law and constitutional democracy.*

*The research employs a normative juridical approach using descriptive-analytical methods. The approaches applied include statutory, conceptual, and comparative analyses, particularly drawing comparisons with presidential systems in countries such as the United States and South Korea. Data were collected through literature studies of legislation, legal doctrines, constitutional norms, and state practices.*

*The findings reveal that the absence of a comprehensive law regulating the Presidential Institution has created a significant legal vacuum, weakening the effectiveness of oversight and power balance mechanisms. The President's broad authority remains largely unrestricted by structured legal norms, thereby opening space for executive dominance and potential abuse of power. The weakness of checks and balances is evident in the lack of legislative and judicial supervision over key presidential policies. In various fields including legislation, executive affairs, judiciary, public finance, defense and security, and foreign relations presidential authority is not adequately constrained by legal regulation. Therefore, enacting a Presidential Institution Law is a constitutional imperative to clarify the structure, functions, and limits of presidential power in order to reinforce the rule of law and democratic governance.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim*, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya yang memungkinkan peneliti menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis yang berjudul “*Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan*” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait kekosongan hukum dalam pengaturan lembaga kepresidenan dan urgensi pembentukan undang-undang yang membatasi kekuasaan Presiden. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menjalani studi di Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan akademik yang sangat berarti bagi peneliti selama proses penyusunan tesis ini.

3. Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., atas arahannya yang sangat berguna, serta dorongan yang memotivasi peneliti untuk terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa selama peneliti mengerjakan tesis ini. Bimbingan beliau sangat membantu peneliti untuk mencapai penyelesaian tesis ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, wawasan, dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang perjalanan studi peneliti.
6. Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam administrasi yang mendukung kelancaran studi peneliti.
7. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Kepada orang tua peneliti, yang telah memberi kasih sayang, nasihat, dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh tanggung jawab.
8. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan moral dan teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat dalam

setiap langkah yang peneliti tempuh. Tanpa kalian, perjalanan ini terasa kurang lengkap.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, memberikan dukungan, serta menjadi bagian penting dalam penyelesaian tesis ini. Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang diberikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Harapan peneliti, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan, maupun sebagai kontribusi bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai lembaga kepresidenan.

*Aamiin Ya Rabbal Alamin*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Peneliti,

Trenadi Prasetya

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian.....	48
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	60
BAB II URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN .....	63
A. Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Lembaga Kepresidenan ...	63
B. Pembatasan Kekuasaan Presiden Melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.....	69

C. Memperkuat <i>Checks and Balances</i> melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.....	79
---	----

BAB III PENGATURAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM UNDANG- UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN.....	86
A. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Bidang Legislasi .....	86
B. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Bidang Eksekutif .....	97
C. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Bidang Kehakiman .....	110
D. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Bidang Keuangan.....	117
E. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.....	112
F. Pengaturan Kewenangan Presiden dalam Bidang Hubungan Luar Negeri.....	130
 BAB IV PENUTUP .....	 137
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1:</b> Komparasi Kewenangan Legislasi Presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan .....	94
<b>Tabel 3.2:</b> Komparasi Pembagian Kekuasaan Eksekutif Presiden dalam Konteks Pemilu dan Pengangkatan Pejabat .....	107
<b>Tabel 3.3:</b> Komparasi Kewenangan Kehakiman Presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan .....	114
<b>Tabel 3.4:</b> Komparasi Kewenangan Presiden dalam Bidang Keuangan Negara .....	120
<b>Tabel 3.5:</b> Komparasi Kewenangan Presiden dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.....	128
<b>Tabel 3.6:</b> Komparasi Kewenangan Presiden dalam Hubungan Luar Negeri	134